

TABLE OF CONTENTS

No.	News Title	Media Source	Page
1.	Minerba Convex 2025: Ajang Promosi Positif Sektor Pertambangan <i>Minerba Convex 2025: A Positive Promotion Event for the Mining Sector</i>	Navigasi.co.id	3
2.	Aturan Baru RKAB: Otomatis Disetujui Meski Tak Ditanggapi Menteri <i>New RKAB Regulation: Automatically Approved Even if No Response from the Minister</i>	Bloomberg Technoz	6
3.	190 IUP Ditangguhkan ESDM: IMA, APBI, dan APNI Pastikan Anggotanya Aman <i>190 Mining Business Licenses Suspended by ESDM: IMA, APBI, and APNI Ensure Members' Safety</i>	Kontan	9
4.	Merdeka Gold (EMAS) Targetkan Produksi Perdana pada Kuartal I 2026 <i>Merdeka Gold (EMAS) Targets Initial Production in the First Quarter of 2026</i>	Investor.id	10
5.	PT Timah (TINS) Buka Suara Soal Pelimpahan Aset Hasil Sitaan Kejaksaan Agung <i>PT Timah (TINS) Speaks Out Regarding the Transfer of Confiscated Assets by the Attorney General's Office</i>	Bisnis	13
6.	Bahlil Ungkap Syarat Koperasi Bisa Kelola Tambang Minerba <i>Bahlil Reveals Requirements for Cooperatives to Manage Mineral and Coal Mines</i>	Katadata	14
7.	Pengusaha Batu Bara Wajib Prioritaskan Kebutuhan Dalam Negeri Sebelum Ekspor <i>Coal Entrepreneurs Must Prioritize Domestic Needs Over Exports</i>	Okezone	16
8.	Kementerian ESDM Kembalikan Izin Tambang, Tapi Mayoritas Masih Terancam Dicabut <i>The Ministry of ESDM Reinstates Mining Permits, But Most Still Face Revocation</i>	Kontan	18

9.	Harga Batu Bara Bangkit Usai Mati Suri, Terima Kasih China & Eropa <i>Coal Prices Rebound After a Slowdown, Thanks to China and Europe</i>	CNBC Indonesia	20
10.	MIND ID Kokohkan Fondasi ESG untuk Hilirisasi dan Masa Depan Berkelanjutan Indonesia <i>MIND ID Strengthens ESG Foundations for Downstreaming and Indonesia's Sustainable Future</i>	Dunia Energi	22
11.	Copper hits \$11 000/t for first time since May 2024	Mining Weekly	24
12.	Silver hits US\$50 for first time in decades	The Business Times	24
13.	Gold poised for eighth weekly rise on firm safe-haven demand	The Economic Times	25
14.	Metso recognises 50 years of front-end comminution with Nordberg C Series jaw crusher	Int'l Mining	26
15.	Copper output from Codelco slides 25% in August after deadly mine accident	Kitco News	27
16.	RANKED: Top 20 biggest copper mines 2025	Mining.com	28



Minerba Convex 2025: Ajang Promosi Positif Sektor Pertambangan

Mazroh Atul Jannah

INDUSTRI mineral dan batubara (minerba) Indonesia bersiap menghadapi momentum besar pada pertengahan Oktober 2025.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama pemangku kepentingan industri akan menggelar Mineral dan Batu Bara Convention and Expo (Minerba Convex) 2025 pada 15–16 Oktober 2025 di Jakarta International Convention Center.

Acara ini dirancang tidak sekadar sebagai pameran industri, tetapi juga sebagai platform strategis untuk memperlihatkan kontribusi sektor minerba terhadap pembangunan nasional.

Dengan skala lebih besar dan format inklusif, Minerba Convex 2025 hadir untuk menampilkan sisi positif dari industri yang kerap mendapat sorotan negatif terkait isu lingkungan dan praktik pertambangan.

“Kita tahu kalau sektor keadaan batubara itu berkontribusi sangat besar ya di Indonesia bagi penerimaan negara. Nah kita tahu juga saat ini kan sering disorot untuk terkait memang beberapa hal terkait tambang yang negatif, lingkungan, dan sebagainya. Sehingga acara ini diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih positif gitu,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Siti Sumilah Rita Susilawati.

Minerba Convex 2025 juga akan menampilkan rangkaian kegiatan yang lebih interaktif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain pameran,...

Minerba Convex 2025: A Positive Promotion Event for the Mining Sector

Mazroh Atul Jannah

INDONESIA's mineral and coal (minerba) industry is poised to face significant momentum in mid-October 2025.

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) together with industry stakeholders will hold the Mineral and Coal Convention and Expo (Minerba Convex) 2025 on October 15–16, 2025, at the Jakarta International Convention Center.

This event is designed not only as an industry exhibition, but also as a strategic platform to showcase the contribution of the mineral and coal sector to national development.

With a larger scale and inclusive format, Minerba Convex 2025 aims to showcase the positive side of an industry that often receives negative attention regarding environmental issues and mining practices.

“We know that the coal sector contributes significantly to state revenue in Indonesia. We also know that it's often under scrutiny due to negative aspects related to mining, the environment, and so on. So, this event is expected to provide more positive information,” said Siti Sumilah Rita Susilawati, Secretary of the Directorate General of Minerals and Coal at the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Minerba Convex 2025 will also feature a more interactive series of activities than in previous years. In addition to exhibitions,...

Selain pameran, acara ini akan diisi konferensi, sesi berbagi pengetahuan, dan penyebarluasan informasi publik. Tujuannya, agar masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan semakin memahami isu-isu yang berkembang di sektor minerba serta menyoroti kontribusi positif industri ini terhadap ekonomi nasional.

Ketua Panitia Minerba Convex 2025 sekaligus Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Resvani, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan nasional.

"Negara kita sedang membangun. Untuk membangun ini kita butuh kebersamaan. Semua komponen harus ikut bekerja sama dengan baik, berkolaborasi dengan baik gitu ya," ujar Resvani.

Kegiatan ini akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat luas. Bahkan, seluruh gubernur diundang untuk turut berpartisipasi, menegaskan komitmen bersama dalam pengembangan sektor pertambangan.

Selain itu, Minerba Convex 2025 menghadirkan berbagai zona interaktif, termasuk career hub dan experience zone yang ramah keluarga. Pengunjung dapat membawa anak-anak untuk belajar sambil bermain, sekaligus memperkenalkan dunia pertambangan kepada generasi muda. Inisiatif ini sejalan dengan upaya membangun citra industri yang edukatif dan bertanggung jawab.

Dari sisi finansial, Kementerian ESDM optimistis target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba tetap dapat tercapai pada akhir 2025. Data dari Mineral One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM menunjukkan, realisasi PNBP hingga 26 Agustus 2025 telah mencapai Rp 84,20 triliun, setara 67,52% dari target APBN 2025 sebesar Rp 124,71 triliun.

In addition to exhibitions, the event will feature conferences, knowledge-sharing sessions, and public information dissemination. The goal is to enhance the public and various stakeholders' understanding of emerging issues in the mineral and coal sector and highlight the industry's positive contribution to the national economy.

Resvani, Chair of the Minerba Convex 2025 Committee and Deputy Chair of the Indonesian Mining Experts Association (Perhapi), emphasized the importance of cross-sector collaboration in national development.

"Our country is developing. To build this, we need togetherness. All components must work together well and collaborate effectively," said Resvani.

This event will bring together government officials, businesspeople, academics, and the wider community. In fact, all governors are invited to participate, affirming a shared commitment to developing the mining sector.

Additionally, Minerba Convex 2025 features various interactive zones, including a career hub and a family-friendly experience zone. Visitors can bring their children to learn through play, while also introducing the world of mining to the younger generation. This initiative aligns with efforts to build an image of an educational and responsible industry.

From a financial perspective, the Ministry of ESDM is optimistic that the Non-Tax State Revenue (PNBP) target for the mineral and coal sector can still be achieved by the end of 2025. Data from the Ministry of Energy and Mineral Resources' Mineral One Data Indonesia (MODI) shows that PNBP realization until August 26, 2025, has reached IDR 84.20 trillion, equivalent to 67.52% of the 2025 State Budget target of IDR 124.71 trillion.

"Secara umum PNBPN di kita secara target per 1 September 2025 ini 70%. Jadi untuk PNBPN sesuai target insyaallah sampai akhir tahun sesuai target," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (3/9).

Acara tahunan ini menjadi platform untuk menegaskan bahwa sektor minerba tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan teknologi pertambangan yang lebih berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, pemerintah dan pelaku industri berharap masyarakat bisa melihat sektor minerba sebagai bagian dari pembangunan nasional yang positif dan bertanggung jawab.

Minerba Convex 2025 juga menyediakan ruang bagi diskusi strategis tentang isu regulasi, praktik pertambangan berkelanjutan, serta peluang investasi. Pemerintah menilai, dialog terbuka dengan pelaku industri, akademisi, dan publik menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap sektor ini.

Dengan berbagai kegiatan yang dirancang untuk inklusivitas dan edukasi publik, Minerba Convex 2025 diyakini akan memperkuat citra industri pertambangan Indonesia, sekaligus menegaskan peran pentingnya dalam pembangunan nasional. Ke depan, momentum ini diharapkan mendorong kolaborasi yang lebih solid antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara secara berkelanjutan. 🌐

"In general, our PNBPN target as of September 1, 2025, is 70%. So, God willing, we will meet the target by the end of the year," said Tri Winarno, Director General of Minerals and Coal at the Ministry of Energy and Mineral Resources, when met at the Indonesian House of Representatives Complex on Wednesday (September 3).

This annual event serves as a platform to emphasize that the mineral and coal sector plays a role not only as a source of state revenue but also as a driver of economic development, employment, and the use of more sustainable mining technologies. Through this activity, the government and industry players hope that the public will see the mineral and coal sector as a positive and responsible part of national development.

Minerba Convex 2025 also provides space for strategic discussions on regulatory issues, sustainable mining practices, and investment opportunities. The government believes that open dialogue with industry players, academics, and the public is key to increasing transparency and trust in the sector.

With various activities designed for inclusivity and public education, Minerba Convex 2025 is believed to strengthen the image of the Indonesian mining industry and emphasize its crucial role in national development. Going forward, this momentum is expected to foster stronger collaboration between the government, the private sector, and communities in managing mineral and coal resources sustainably. 🌐



Aturan Baru RKAB: Otomatis Disetujui Meski Tak Ditanggapi Menteri

Nyoman Ary Wahyudi

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi mengembalikan periode pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi satu tahun, dari sebelumnya ditetapkan selama 3 tahun.

Amanat itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan RKAB serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beleid itu diundangkan di Jakarta pada 3 Oktober 2025.

Lewat beleid anyar itu, Bahlil turut memasukkan sejumlah ketentuan baru berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat proses persetujuan RKAB pelaku usaha tambang.

Misalkan, Kementerian ESDM memberi batas waktu evaluasi dan perbaikan pengajuan RKAB selama satu pekan. Selanjutnya, otoritas mineral dan batu bara turut mematok evaluasi dan perbaikan dokumen RKAB sebanyak tiga kali kepada perusahaan.

Setelah evaluasi dan perbaikan RKAB rampung, Menteri ESDM atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya mesti memberi keputusan persetujuan atau penolakan permohonan RKAB paling lama 8 hari kerja.

New RKAB Regulation: Automatically Approved Even if No Response from the Minister

Nyoman Ary Wahyudi

THE MINISTER of Energy and Mineral Resources (ESDM) Bahlil Lahadalia officially returned the submission period for the Work Plan and Budget (RKAB) to one year, from the previous three years.

This mandate is stipulated in Ministerial Regulation (Permen) of ESDM Number 17 of 2015 concerning Procedures for the Preparation, Submission, and Approval of the Work Plan and Budget (RKAB) and Procedures for Reporting on the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. The policy was promulgated in Jakarta on October 3, 2025.

Through this new policy, Bahlil also included a number of new provisions related to the government's efforts to expedite the approval process for mining business actors' RKAB.

For example, the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) sets a one-week deadline for evaluating and revising RKAB submissions. Furthermore, the mineral and coal authorities also require companies to review and revise RKAB documents three times.

After the evaluation and revision of the RKAB is completed, the Minister of Energy and Mineral Resources or the Governor, in accordance with their authority, must issue a decision on approval or rejection of the RKAB application within a maximum of 8 working days.

Apabila tidak ada keputusan terkait dengan status persetujuan atau penolakan usulan RKAB itu, maka sistem akan secara otomatis memberi persetujuan untuk RKAB baru tersebut.

“Dalam hal permohonan yang disampaikan pemegang perizinan berusaha telah lengkap dan RKAB belum mendapatkan persetujuan atau penolakan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud, persetujuan RKAB diterbitkan oleh sistem informasi terkait RKAB secara otomatis,” dikutip dari Pasal 6 ayat (6) permen tersebut.

lhwal sistem informasi itu, Bahlil turut mendorong integrasi pertukaran data antar muka sistem RKAB dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau sistem *online single submission* (OSS).

Di sisi lain, perusahaan tambang mesti mengajukan usulan RKAB antara 1 Oktober hingga 15 November setiap tahunnya, untuk bisa mendapat persetujuan dokumen tambang sebelum tahun berjalan berakhir.

Beleid ini juga ikut mengatur sanksi bagi perusahaan yang mengerek produksi melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Sejumlah sanksi itu di antaranya pengurangan rencana produksi tahun berikutnya dan kewajiban membayar iuran atas kelebihan realisasi produksi tersebut.

Dalam ketentuan peralihan, Bahlil meminta pelaku usaha untuk mengintegrasikan sistem informasi RKAB dengan sistem OSS dalam jangka waktu enam bulan sejak permen diundangkan.

Selain itu, pelaku usaha mesti menyesuaikan kembali RKAB untuk 2026 dan 2027 yang sebelumnya telah disetujui oleh Menteri ESDM atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum permen anyar ini terbit.

If there is no decision regarding the approval or rejection status of the RKAB proposal, the system will automatically give approval for the new RKAB.

"In the event that the application submitted by the business permit holder is complete and the RKAB has not received approval or rejection after the end of the period as referred to, the RKAB approval will be issued by the RKAB related information system automatically," quoted from Article 6 paragraph (6) of the regulation.

Regarding the information system, Bahlil also encouraged the integration of data exchange between the RKAB system interface and the electronically integrated business licensing system or *online single submission* (OSS) system.

On the other hand, mining companies must submit RKAB proposals between October 1 and November 15 each year, in order to obtain approval for mining documents before the end of the current year.

This policy also stipulates sanctions for companies that exceed government-set production quotas. These sanctions include a reduction in the following year's production plan and the obligation to pay contributions for the excess production.

In the transitional provisions, Bahlil asked business actors to integrate the RKAB information system with the OSS system within six months of the regulation being enacted.

In addition, business actors must readjust their RKAB for 2026 and 2027, which were previously approved by the Minister of Energy and Mineral Resources or the Governor, in accordance with their authority, before this new regulation is issued.

Kendati demikian, Bahlil tetap memberi masa tenggang sampai dengan 31 Maret 2026 untuk RKAB baru yang telah diajukan pelaku usaha tapi belum mendapatkan persetujuan sampai akhir periode 2025.

“RKAB Tahun 2026 yang telah disetujui oleh Menteri atau Gubernur sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masih dapat diacu dan digunakan sebagai dasar kegiatan eksplorasi atau operasi produksi sampai dengan 31 Maret 2026,” dikutip dari pasal 35 (d) beleid tersebut.

Lewat pertimbangan terbitnya permen anyar ini, Bahlil menerangkan, pengembalian jangka waktu pengajuan RKAB menjadi satu tahun berdasarkan pada tren penurunan harga komoditas mineral dan batu bara global saat ini.

Menurut Bahlil, pengembalian periode RKAB satu tahunan untuk menjaga penerimaan negara di tengah pelemahan harga komoditas belakangan.

“Penurunan harga komoditas mineral dan batu bara global memerlukan berbagai upaya untuk menjaga penerimaan negara, salah satunya berupa pengaturan kembali RKAB setiap tahun,” tulis Bahlil seperti dikutip dari permen anyar itu dikutip Kamis (9/10/2025). **(naw/wdh)**

However, Bahlil still provided a grace period until March 31, 2026, for new RKABs that had been submitted by business actors but had not received approval by the end of the 2025 period.

“The 2026 RKAB that has been approved by the Minister or Governor before the enactment of this Ministerial Regulation can still be referred to and used as the basis for exploration activities or production operations until March 31, 2026,” quoted from Article 35 (d) of the policy.

Bahlil explained that the reason for the issuance of this new regulation was that the timeframe for submitting the Work Plan and Budget (RKAB) was reduced to one year due to the current downward trend in global mineral and coal commodity prices.

According to Bahlil, the return to the annual RKAB period aims to maintain state revenue amidst the recent weakening of commodity prices.

“The decline in global mineral and coal commodity prices requires various efforts to maintain state revenues, one of which is the annual restructuring of the State Budget and Work Plan (RKAB),” Bahlil wrote, as quoted in the new regulation on Thursday (October 9, 2025). **(naw/wdh)**

Kontan.co.id

190 IUP Ditangguhkan ESDM: IMA, APBI, dan APNI Pastikan Anggotanya Aman

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor:
Yudho Winarto

TIGA asosiasi pertambangan besar, yakni Indonesia Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), dan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), memastikan tidak ada anggotanya yang termasuk dalam daftar 190 perusahaan tambang yang izin usahanya ditangguhkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Eksekutif IMA Hendra menegaskan bahwa seluruh anggota IMA tidak termasuk dalam daftar tersebut.

"Tidak ada anggota IMA dari 190 perusahaan yang ada di daftar," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (9/10/2025).

Hal senada disampaikan Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani. "Tidak ada anggota kami dalam list tersebut," kata Gita.

Sementara itu, Dewan Penasihat APNI, Djoko Widajatno, juga memastikan anggotanya tidak terdampak penangguhan izin.

"Terkonfirmasi, APNI tidak ada yang terkena penghentian operasi," ujarnya.

Meski demikian, Djoko menyatakan dukungan terhadap langkah tegas pemerintah dalam memastikan kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan.

"Namun pemerintah juga perlu memberi ruang transisi bagi perusahaan yang sedang memperbaiki cashflow atau melakukan migrasi ke sistem perizinan digital," tambahnya.

190 Mining Business Licenses Suspended by ESDM: IMA, APBI, and APNI Ensure Members' Safety

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor:
Yudho Winarto

THREE major mining associations, namely the Indonesia Mining Association (IMA), the Indonesian Coal Mining Association (APBI), and the Indonesian Nickel Miners Association (APNI), confirmed that none of their members were included in the list of 190 mining companies whose business permits were suspended by the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM).

IMA Executive Director Hendra emphasized that all IMA members were not included in the list.

"There are no IMA members among the 190 companies on the list," he told Kontan.co.id, Thursday (9/10/2025).

Acting Executive Director of APBI, Gita Mahyarani, echoed this sentiment. "None of our members are on the list," she said.

Meanwhile, APNI Advisory Board member Djoko Widajatno also confirmed that his members were not affected by the permit suspension.

"It has been confirmed that no APNI operations have been suspended," he said.

However, Djoko expressed support for the government's firm steps to ensure compliance with environmental obligations.

"However, the government also needs to provide transitional space for companies improving cash flow or migrating to a digital licensing system," he added.

Sebagai informasi, penangguhan izin 190 perusahaan tambang tersebut dilakukan melalui surat Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025 tertanggal 18 September 2025.

Dari total 190 izin yang ditangguhkan, sebanyak 90 merupakan tambang batubara, tiga izin pertambangan aspal, dan 97 lainnya tambang mineral.

Direktur Jenderal Minerba ESDM, Tri Winarno, mengungkapkan saat ini sudah ada sekitar 10–15 perusahaan yang menyelesaikan kewajiban jaminan reklamasi sehingga izinnya telah dikembalikan. 

For information, the suspension of permits for 190 mining companies was carried out through a letter from the Directorate General of Minerals and Coal (Minerba) of the Ministry of ESDM Number T-1533/MB.07/DJB.T/2025 dated September 18, 2025.

Of the total 190 suspended permits, 90 were for coal mining, three for asphalt mining, and 97 for mineral mining.

The Director General of Mineral and Coal at the Ministry of Energy and Mineral Resources, Tri Winarno, revealed that currently around 10-15 companies have completed their reclamation guarantee obligations and therefore their permits have been returned. 

INVESTOR.id

Merdeka Gold (EMAS) Targetkan Produksi Perdana pada Kuartal I 2026

Penulis : Euis Rita Hartati

PT MERDEKA Gold Resources Tbk (EMAS) menyatakan fundamental operasional EMAS menunjukkan penguatan yang solid. Perseroan melaporkan telah memulai aktivitas penambangan perdana (first mining) pada 1 Oktober 2025.

Sesuai jadwal, target produksi emas perdana (first gold production) ditetapkan pada kuartal I tahun 2026 (1Q26), dengan proyeksi puncak produksi (peak production) mencapai sekitar 500 ribu ons emas per tahun pada 2032.

Penguatan fundamental ini didukung oleh peningkatan signifikan cadangan dan sumber daya. Presiden Direktur PT Merdeka Gold Resources Tbk Boyke Abidin menjelaskan, berdasarkan studi teknis terbaru,...

Merdeka Gold (EMAS) Targets Initial Production in the First Quarter of 2026

Author: Euis Rita Hartati

PT MERDEKA Gold Resources Tbk (EMAS) stated that EMAS' operational fundamentals are showing solid strength. The company reported that it will commence its first mining operations on October 1, 2025.

As scheduled, the first gold production target is set for the first quarter of 2026 (1Q26), with peak production projected to reach around 500 thousand ounces of gold per year in 2032.

This fundamental strengthening is supported by a significant increase in reserves and resources. President Director of PT Merdeka Gold Resources Tbk, Boyke Abidin, explained that, based on the latest technical study,...

berdasarkan studi teknis terbaru, cadangan bijih emas (ore reserve) tambang emas Pani kini meningkat menjadi 4,8 juta ons, berdasarkan laporan perseroan per 6 Oktober 2025.

"Angka ini 150 persen lebih tinggi dibanding cadangan sebelumnya sebesar 1,9 juta ons, dari kandungan sumber daya mineral (mineral resource) melebihi 7 juta ons," ujarnya dalam sebuah keterangan, Rabu (8/10).

Sementara itu, total sumber daya (resources) tercatat lebih dari 7 Moz, yang mencerminkan potensi ekspansi jangka panjang yang kuat. Secara keseluruhan, kata dia, kombinasi antara struktur kepemilikan yang lebih terdiversifikasi dan fundamental operasional yang semakin kokoh menempatkan EMAS dalam fase pertumbuhan baru yang strategis di bawah koordinasi Grup Merdeka.

Sebagai informasi, EMAS dan MBMA merupakan bagian dari ekosistem PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) yang dikendalikan oleh PT Provident Capital Indonesia dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.

Sementara itu, perusahaan juga mengumumkan adanya perubahan signifikan dalam struktur kepemilikan saham perseroan pasca Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

Berdasarkan laporan pemegang saham bulanan per 30 September 2025, porsi kepemilikan publik (free float) emiten meningkat tajam, bersamaan dengan divestasi yang dilakukan oleh salah satu investor strategis, Boy Thohir.

Menurut laporan tersebut, free float saham EMAS kini diperkirakan mencapai 4,85 miliar lembar saham, atau setara dengan 29,9% dari total saham beredar. Angka ini menunjukkan peningkatan hampir tiga kali lipat dibandingkan posisi saat IPO pada 23 September 2025, di mana saham yang ditawarkan kepada publik berjumlah 1,61 miliar lembar atau sekitar 10%.

based on the latest technical study, the Pani gold mine's gold ore reserves have now increased to 4.8 million ounces, according to the company's report as of October 6, 2025.

"This figure is 150 percent higher than the previous reserves of 1.9 million ounces, from mineral resource content exceeding 7 million ounces," he said in a statement on Wednesday (8/10).

Meanwhile, total resources are recorded at over 7 million metric tons, reflecting strong long-term expansion potential. Overall, he said, the combination of a more diversified ownership structure and increasingly robust operational fundamentals position EMAS for a new, strategic growth phase under the leadership of the Merdeka Group.

For your information, EMAS and MBMA are part of the PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) ecosystem which is controlled by PT Provident Capital Indonesia and PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.

Meanwhile, the company also announced significant changes in the company's share ownership structure following the Initial Public Offering (IPO).

Based on the monthly shareholder report as of September 30, 2025, the issuer's public ownership (free float) portion increased sharply, coinciding with the divestment carried out by one of its strategic investors, Boy Thohir.

According to the report, EMAS's free float is now estimated at 4.85 billion shares, equivalent to 29.9% of the total outstanding shares. This figure represents a nearly threefold increase compared to the IPO on September 23, 2025, when the shares offered to the public totaled 1.61 billion shares, or approximately 10%.

Seiring dengan peningkatan porsi publik, laporan yang sama mencatat bahwa Garibaldi 'Boy' Thohir tidak lagi tercantum dalam daftar pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa Boy Thohir telah melakukan pelepasan atas seluruh atau sebagian besar kepemilikannya yang sebelumnya, berdasarkan Prospektus IPO, berjumlah 905.037.245 lembar saham atau setara 6,21%.

Peningkatan free float ini merupakan sentimen positif yang signifikan bagi EMAS di pasar modal. Kenaikan porsi saham publik membuka peluang bagi perseroan untuk mendapatkan bobot yang lebih besar dalam kalkulasi indeks global, seperti MSCI (Morgan Stanley Capital International), yang menggunakan metodologi free float adjusted market capitalization.

Potensi ini diharapkan dapat memperluas basis investor internasional, memperkuat likuiditas perdagangan saham, serta meningkatkan daya tarik EMAS di mata investor institusional. Aksi korporasi ini dinilai sejalan dengan tren transisi fokus pribadi Boy Thohir.

Sebelumnya, ia juga telah melepas kepemilikan di PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) pada Agustus 2024 dan telah mengundurkan diri dari berbagai posisi strategis, termasuk Komisaris di PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) sejak Maret 2022, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) sejak April 2023, dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) sejak Juni 2025. Transisi ini mencapai puncaknya saat ia menyerahkan kepemimpinan operasional Grup Adaro pada Juni 2025 untuk lebih fokus pada kegiatan filantropi. Editor: Euis Rita Hartati

Along with the increase in public ownership, the same report noted that Garibaldi 'Boy' Thohir was no longer listed as a shareholder with ownership above 5%. This indicates that Boy Thohir had divested all or most of his previous ownership, which, according to the IPO Prospectus, amounted to 905,037,245 shares, equivalent to 6.21%.

This increase in free float represents a significant positive sentiment for GOLD in the capital market. The increase in the public shareholding opens up opportunities for the company to gain greater weighting in global index calculations, such as MSCI (Morgan Stanley Capital International), which uses the free float-adjusted market capitalization methodology.

This potential is expected to expand the international investor base, strengthen stock trading liquidity, and increase the attractiveness of gold to institutional investors. This corporate action is considered in line with Boy Thohir's shift in personal focus.

Previously, he also released his ownership in PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) in August 2024 and has resigned from various strategic positions, including Commissioner at PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) since March 2022, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) since April 2023, and PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) since June 2025. This transition culminated when he handed over the operational leadership of the Adaro Group in June 2025 to focus more on philanthropic activities. Editor: Euis Rita Hartati

Bisnis.com

PT Timah (TINS) Buka Suara Soal Pelimpahan Aset Hasil Sitaan Kejaksaan Agung

Penulis : Ana Noviani

PT TIMAH TBK. (TINS) buka suara terkait dengan pelimpahan aset hasil rampasan dari kasus penambangan ilegal.

Division Head Corporate Secretary TINS Rendi Kurniawan mengatakan perseroan saat ini sedang melakukan proses verifikasi dan validasi secara menyeluruh terkait dengan pelimpahan smelter, alat berat, dan aset sitaan lain kasus penambangan ilegal dari Kejaksaan Agung.

Hal itu dilakukan sejalan dengan prinsip good corporate governance (GCG) dan kepatuhan hukum yang berlaku.

"Setelah seluruh proses verifikasi dan validasi selesai, perseroan dapat menyusun rencana tindak lanjut dan mekanisme pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan internal tata kelola perusahaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku," tulisnya dalam keterbukaan informasi, Kamis (9/10/2025).

Sampai saat ini, lanjut Rendi, TINS masih berproses untuk menerima secara keseluruhan aset hasil sitaan yang dimaksud.

Berdasarkan laman resmi Sekretariat Negara, barang rampasan kasus penambangan ilegal diserahkan secara bertahap dari Kejaksaan Agung ke kepada Wakil Menteri Keuangan, dilanjutkan dari Wakil Menteri Keuangan kepada CEO Danantara.

PT Timah (TINS) Speaks Out Regarding the Transfer of Confiscated Assets by the Attorney General's Office

Author: Ana Noviani

PT TIMAH TBK. (TINS) has spoken out regarding the transfer of assets seized from illegal mining.

TINS Corporate Secretary Division Head Rendi Kurniawan said the company is currently conducting a comprehensive verification and validation process related to the transfer of smelters, heavy equipment, and other confiscated assets from the Attorney General's Office in the illegal mining case.

This is done in line with the principles of good corporate governance (GCG) and compliance with applicable laws.

"Once the entire verification and validation process is complete, the company can develop a follow-up plan and management mechanism in accordance with internal corporate governance provisions and applicable laws and regulations," he wrote in an information disclosure on Thursday (October 9, 2025).

Until now, Rendi continued, TINS is still in the process of receiving all the confiscated assets in question.

According to the official website of the State Secretariat, the confiscated goods from the illegal mining case were handed over in stages from the Attorney General's Office to the Deputy Minister of Finance, followed by the Deputy Minister of Finance to the CEO of Danantara.

Akhirnya, aset tersebut diserahkan CEO Danantara kepada Direktur Utama PT Timah Tbk. (TINS). Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk. disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Pangkal Pinang pada Senin (6/10/2025).

Barang rampasan yang diserahkan mencakup aset berupa 108 unit alat berat, 99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer), 94,47 ton crude tin dalam 112 petakan/balok, aluminium 15 bundle (15,11 ton) dan 10 jumbo bag (3,15 ton), logam timah Rfe 29 bundle (29 ton), mess karyawan 1 unit, kendaraan 53 unit, tanah 22 bidang seluas 238.848 m², alat pertambangan 195 unit, logam timah 680.687,6 kg, serta 6 unit smelter.

Rendi mengaskan pelimpahan aset hasil sitaan tersebut masih berproses sehingga sekarang belum memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perseroan.

Yang jelas, lanjutnya, TINS berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap aset yang nantinya akan dikelola berada dalam pengawasan dan pengendalian internal. Seluruh pengelolaan aset akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pemerintah. Editor : Ana Noviani

Finally, the assets were handed over by the CEO of Danantara to the President Director of PT Timah Tbk. (TINS). The handover of the Confiscated State Assets (BRN) to PT Timah Tbk. was witnessed by President Prabowo Subianto in Pangkal Pinang on Monday (October 6, 2025).

The confiscated goods included assets in the form of 108 units of heavy equipment, 99.04 tons of Sn crystal products (cristalyzer), 94.47 tons of crude tin in 112 plots/blocks, 15 bundles of aluminum (15.11 tons) and 10 jumbo bags (3.15 tons), 29 bundles of Rfe tin metal (29 tons), 1 employee mess unit, 53 vehicles, 22 plots of land with an area of 238,848 m², 195 units of mining equipment, 680,687.6 kg of tin metal, and 6 smelter units.

Rendi emphasized that the transfer of confiscated assets is still in process and has not yet had a material impact on the company's operational activities or financial condition.

What is clear, he continued, is that TINS is committed to ensuring that every asset it manages is under internal supervision and control. All asset management will be conducted transparently, accountably, and in accordance with government-determined objectives. Editor: Ana Noviani

Dkatadata.co.id

Bahlil Ungkap Syarat Koperasi Bisa Kelola Tambang Minerba

Penulis: Mela Syaharani

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar koperasi bisa mengelola tambang mineral dan batu bara.

Bahlil Reveals Requirements for Cooperatives to Manage Mineral and Coal Mines

Author: Mela Syaharani

MINISTER of Energy and Mineral Resources (ESDM) Bahlil Lahadalia revealed several requirements that must be met for cooperatives to manage mineral and coal mines.

Pengelolaan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Syarat yang harus dipenuhi yakni bergerak di bidang pertambangan, kemudian harus berlokasi di sekitar tambang.

"Karena (pengelolaan) ini bentuk afirmatif negara kepada pelaku UKM dan koperasi di daerah. Jadi contohnya di Sulawesi ada nikel, maka koperasinya harus yang berasal dari daerah tersebut dan tidak boleh dari tempat lain," kata Bahlil saat ditemui di Jakarta International Convention Center, Senayan, Kamis (9/10).

Bahlil menyebut syarat kedekatan lokasi ini dimaksudkan sebagai bentuk keadilan yang dilakukan negara. Selain itu, Kementerian ESDM saat ini sedang membuat aturan turunan terkait pengelolaan tambang bagi koperasi serta usaha kecil dan menengah.

"Peraturan menterianya sedang dibuat, sedang dibahas," ujarnya.

Bahlil mengatakan terkait kesiapan sumber daya manusia untuk mengelola tambang minerba ini dilakukan secara paralel.

"Dilakukan sambil berjalan dan ini kan bisa dilakukan kerja sama. Jangan selalu berpikir siap dulu baru kerja, paralel saja karena kami ingin semuanya (berjalan) supaya bertumbuh sama-sama," ucapnya.

Pengelolaan tambang oleh koperasi tercantum pada beberapa ayat dalam pasal 26 PP Nomor 29 Tahun 2025.

This management is stipulated in Government Regulation (PP) Number 39 of 2025 concerning the second amendment to PP Number 96/2021 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. This regulation is a derivative of Law Number 2 of 2025 concerning Mineral and Coal Mining.

The requirements that must be met are that the business must be operating in the mining sector and must be located near a mine.

"Because this (management) is a form of affirmative action by the state towards SMEs and cooperatives in the region. For example, if there's nickel in Sulawesi, the cooperatives must be from that region and not from anywhere else," Bahlil said when met at the Jakarta International Convention Center in Senayan on Thursday (October 9).

Bahlil stated that the proximity requirement is intended as a form of fairness by the state. Furthermore, the Ministry of Energy and Mineral Resources is currently developing derivative regulations regarding mining management for cooperatives and small and medium enterprises.

"The ministerial regulation is being drafted and discussed," he said.

Bahlil stated that the readiness of human resources to manage mineral and coal mines is being carried out in parallel.

"It's being done as we go along, and this can be done collaboratively. Don't always think about getting things ready before starting. Just work in parallel, because we want everything to grow together," he said.

Mining management by cooperatives is stated in several paragraphs in Article 26 of PP Number 29 of 2025.

Di pasal 26 C, tertulis bahwa verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria keanggotaan koperasi bagi pemberian prioritas kepada koperasi, dilakukan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi.

Kemudian pada pasal 26 E, berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 C, Menteri menerbitkan persetujuan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara prioritas melalui Sistem OSS.

Selain itu, pada Pasal 26 F menuliskan luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara untuk koperasi dan badan Usaha Kecil dan Menengah diberikan paling luas sebesar 2.500 hektare. Editor: Tia Dwitiani Komalasari

In Article 26 C, it is written that verification of administrative criteria regarding the legality and membership criteria of cooperatives for granting priority to cooperatives is carried out by the minister who organizes government affairs in the cooperative sector for cooperatives.

Then in Article 26 E, based on the verification results as referred to in Article 26 C, the Minister issues approval for the granting of Metal Mineral WIUP or Coal WIUP on a priority basis through the OSS System.

Furthermore, Article 26 F states that the maximum area of a Metal Mineral Mining Business Permit (WIUP) or Coal Business Permit (WIUP) for cooperatives and Small and Medium Enterprises (SMEs) is 2,500 hectares. Editor: Tia Dwitiani Komalasari

okezone

Pengusaha Batu Bara Wajib Prioritaskan Kebutuhan Dalam Negeri Sebelum Ekspor

Feby Novalius, Jurnalis

PEMERINTAH resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 sebagai dasar hukum baru dalam pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aturan ini menegaskan kewajiban pemenuhan pasokan bagi badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor ketenagalistrikan, energi, pupuk, dan industri strategis nasional, dalam rangka menjamin keandalan energi dan mendukung ketahanan nasional.

Salah satu yang diatur PP ini adalah wajib pasok industri minerba dalam rangka pemenuhan kebutuhan BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Coal Entrepreneurs Must Prioritize Domestic Needs Over Exports

Feby Novalius, Journalist

THE GOVERNMENT has officially issued Government Regulation (PP) No. 39 of 2025 as a new legal basis for managing the mineral and coal mining (minerba) sector. This regulation affirms the obligation to fulfill supply requirements for state-owned enterprises (SOEs) operating in the electricity, energy, fertilizer, and national strategic industries sectors, to ensure energy reliability and support national resilience.

One of the provisions of this Government Regulation is the mandatory supply of minerals and coal to the state-owned enterprises (SOEs) that control the livelihoods of many people.

Pasal 157 beleid baru ini mengatur prioritas pemanfaatan batu bara dan mineral kritis lainnya untuk BUMN yang mengelola sektor ketenagalistrikan, penyediaan energi, pupuk, dan industri strategis nasional.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, M Kholid Syeirazi, selama ini pelaku usaha tambang, terutama batu bara, lebih mengutamakan ekspor ketimbang menjaga keandalan pasok sumber energi primer dalam negeri.

"Produksi batu bara digenjot, tetapi rata-rata 74% diekspor untuk menopang ketahanan energi negara lain. Di sisi lain, di dalam negeri kurang mendapat jaminan pasok karena operator lebih memilih ekspor di saat harga batu bara tinggi," ujarnya, Kamis (9/10/2025).

PP ini mengunci wajib pasok industri minerba untuk BUMN penyelenggara hajat hidup orang banyak, selaras dengan Asta Cita terkait swasembada energi.

Sementara itu Direktur Manajemen Pembangunan PLN, Rizal Calvary Marimbo mengatakan PLN siap menjalankan mandat sebagai badan usaha milik negara penyedia ketenagalistrikan dengan memberikan pasokan listrik yang prima bagi masyarakat.

"Terima kasih kepada Pemerintah yang telah mempertegas prioritas pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri untuk sektor strategis termasuk pasokan batu bara untuk ketenagalistrikan. PLN siap menjalankan kebijakan ini sebaik-baiknya untuk pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional," ujar Rizal.

Lebih lanjut, pihaknya terus membangun kolaborasi dengan para produsen, penyedia transportasi, dan mitra kerja lainnya untuk memastikan sistem rantai pasok energi primer berjalan dengan baik. **(Feby Novalius)**

Article 157 of this new regulation stipulates the priority use of coal and other critical minerals for SOEs managing the electricity sector, energy supply, fertilizers, and national strategic industries.

According to the Executive Director of the Center for Energy Policy, M Kholid Syeirazi, mining businesses, especially coal ones, have prioritized exports over maintaining the reliability of domestic primary energy supply.

"Coal production is being boosted, but an average of 74% is exported to support other countries' energy security. Meanwhile, domestic supply is less secure because operators prefer exports when coal prices are high," he said on Thursday (October 9, 2025).

This PP locks in mandatory supplies from the mineral and coal industry for state-owned enterprises (BUMN) that provide for the livelihoods of the people, in line with the Asta Cita (Asta Cita) regarding energy self-sufficiency.

Meanwhile, PLN's Director of Generation Management, Rizal Calvary Marimbo, said that PLN is ready to carry out its mandate as a state-owned electricity provider by providing a prime electricity supply to the community.

"Thank you to the government for emphasizing the priority of meeting domestic energy needs for strategic sectors, including coal supply for electricity. PLN is ready to implement this policy to the best of its ability to provide maximum service to the public and support national energy security," said Rizal.

Furthermore, the company continues to build collaborations with producers, transportation providers, and other partners to ensure the smooth operation of the primary energy supply chain. **(Feby Novalius)**

Kontari.co.id

Kementerian ESDM Kembali Izin Tambang, Tapi Mayoritas Masih Terancam Dicabut

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor:
Noverius Laoli

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mengembalikan sebagian izin usaha pertambangan (IUP) yang sebelumnya ditangguhkan.

Langkah ini dilakukan setelah sejumlah perusahaan tambang memenuhi kewajiban mereka dengan membayar dana jaminan reklamasi pascatambang serta memperbaiki dokumen administratif, termasuk koreksi pada laporan produksi yang melampaui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan diperbolehkan kembali beroperasi. "Sebagian-nya sudah jalan," ujarnya di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Kamis (9/10).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan saat ini sekitar 10–15 perusahaan telah melunasi kewajiban jaminan reklamasi sehingga sanksinya dicabut.

Meski begitu, sebagian besar perusahaan tambang masih belum menyelesaikan kewajibannya.

"Kami sudah sampaikan peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Operasi mereka kami hentikan sementara, dan diberi waktu 60 hari sejak surat penangguhan diterbitkan. Kalau tidak ada tindak lanjut, izin tambang akan dicabut," tegas Tri.

The Ministry of ESDM Reinstates Mining Permits, But Most Still Face Revocation

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor:
Noverius Laoli

THE MINISTRY of Energy and Mineral Resources (ESDM) has begun to restore some previously suspended mining business permits (IUP).

This step was taken after a number of mining companies fulfilled their obligations by paying post-mining reclamation guarantee funds and correcting administrative documents, including corrections to production reports that exceeded the Work Plan and Budget (RKAB).

Energy and Mineral Resources Minister Bahlil Lahadalia emphasized that companies that have met the requirements are permitted to resume operations. "Some are already operating," he said at the Jakarta Convention Center (JCC) Senayan on Thursday (October 9).

The Director General of Minerals and Coal at the Ministry of Energy and Mineral Resources, Tri Winarno, explained that currently around 10-15 companies have paid off their reclamation guarantee obligations so that their sanctions have been lifted.

However, most mining companies have not yet fulfilled their obligations.

"We've issued the first, second, and third warnings. We've temporarily suspended their operations, and they've been given 60 days from the date the suspension letter was issued. If there's no follow-up, their mining permit will be revoked," Tri asserted.

la menambahkan, meski izin dicabut, kewajiban reklamasi pascatambang tetap melekat pada perusahaan. Artinya, tanggung jawab memulihkan lahan bekas tambang tetap harus ditunaikan.

Bukan Anggota Asosiasi Besar

Penangguhan terhadap 190 perusahaan tambang ini juga menuai klarifikasi dari asosiasi industri.

Indonesia Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), hingga Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menegaskan bahwa tidak ada satupun anggotanya yang masuk dalam daftar perusahaan yang disanksi.

"Tidak ada anggota IMA dalam 190 perusahaan tersebut," kata Direktur Eksekutif IMA, Hendra Sinadia.

Hal senada disampaikan Plt Direktur Eksekutif APBI, Gita Mahyarani, serta Dewan Penasihat APNI, Djoko Widajatno.

Meski demikian, APNI mendukung langkah pemerintah menegakkan aturan terkait kewajiban lingkungan.

Djoko menilai pemerintah juga perlu memberi ruang transisi bagi perusahaan yang tengah menghadapi kesulitan arus kas atau sedang menyesuaikan diri dengan sistem digital perizinan.

Kebijakan penghentian sementara 190 tambang tersebut tertuang dalam surat Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025 yang ditandatangani pada 18 September 2025.

Hingga kini, baru belasan perusahaan yang melunasi kewajiban dan memperoleh kembali izin operasionalnya.

Adapun jaminan reklamasi tambang adalah dana yang wajib disediakan pemegang IUP atau IUPK sebagai bentuk komitmen untuk melakukan pemulihan lingkungan, mulai dari menata lahan bekas tambang hingga memperbaiki kualitas lingkungan hidup. ➡

He added that even if the permit is revoked, the company remains obligated to undertake post-mining reclamation. This means the company must still fulfill its responsibility to restore the mined area.

Not a Member of a Major Association

The suspension of 190 mining companies also drew clarification from industry associations.

The Indonesian Mining Association (IMA), the Indonesian Coal Mining Association (APBI), and the Indonesian Nickel Miners Association (APNI) confirmed that none of their members were included in the list of sanctioned companies.

"There are no IMA members in the 190 companies," said IMA Executive Director, Hendra Sinadia.

The same thing was conveyed by the Acting Executive Director of APBI, Gita Mahyarani, and the Advisory Board of APNI, Djoko Widajatno.

However, APNI supports the government's steps to enforce regulations related to environmental obligations.

Djoko believes the government also needs to provide transitional space for companies facing cash flow difficulties or adapting to a digital licensing system.

The policy to temporarily suspend the operations of 190 mines is stated in the letter from the Directorate General of Minerals and Coal, Ministry of ESDM Number T-1533/MB.07/DJB.T/2025, signed on September 18, 2025.

To date, only a dozen companies have paid off their obligations and regained their operational permits.

The mine reclamation guarantee is a fund that must be provided by IUP or IUPK holders as a form of commitment to environmental restoration, starting from managing ex-mining land to improving environmental quality. ➡



Harga Batu Bara Bangkit Usai Mati Suri, Terima Kasih China & Eropa

mae, CNBC Indonesia

HARGA batu bara akhirnya bangkit setelah terpuruk selama tiga hari beruntun.

Merujuk Refinitiv, harga batu bara pada perdagangan Kamis (9/10/2025) ditutup di posisi US\$ 106,25 per ton atau menguat 0,47%.

Penguatan ini memperpanjang tren negatif harga batu bara yang melemah 2,08% dalam tiga hari sebelumnya.

Harga batu bara bangkit ditopang sejumlah sentimen positif, mulai berakhirnya liburan China hingga proyeksi kenaikan dari Eropa.

Seperti diketahui, liburan Golden Week China sudah berakhir 8 Oktober dan diharapkan aktivitas bisnis mulai berjalan normal setelahnya. Kondisi ini diharapkan bisa meningkatkan permintaan batu bara.

Setelah libur, pasar thermal coal (batubara termal) di pelabuhan-pelabuhan Cina memang masih menunjukkan sentimen yang berbeda-beda dan tidak ada kecenderungan seragam yang kuat.

Beberapa pelabuhan melihat aktivitas perdagangan yang lesu, dengan pembeli menahan diri, sementara di tempat lain ada tekanan harga menurun akibat pasokan yang cepat pulih.

Sebagian pelabuhan menghadapi tekanan arah harga ke bawah (downside pressure) selama minggu pertama pasca-libur karena pasokan pulih lebih cepat daripada permintaan.

Coal Prices Rebound After a Slowdown, Thanks to China and Europe

mae, CNBC Indonesia

COAL prices have finally recovered after falling for three consecutive days.

According to Refinitiv, coal prices closed at US\$106.25 per ton on Thursday (October 9, 2025), up 0.47%.

This strengthening extended the negative trend in coal prices, which had weakened 2.08% in the previous three days.

Coal prices rose, supported by a number of positive sentiments, from the end of the Chinese holiday to projected increases from Europe.

As is known, China's Golden Week holiday ended on October 8th, and business activity is expected to return to normal afterward. This is expected to boost coal demand.

After the holiday, the thermal coal market at Chinese ports continues to show varying sentiments, with no strong, uniform trend.

Some ports saw sluggish trading activity, with buyers holding back, while elsewhere there was downward price pressure as supplies quickly recovered.

Some ports faced downside price pressure during the first post-holiday week as supply recovered faster than demand.

Aktivitas perdagangan batu bara kokas di Cina relatif tenang dan harga menunjukkan tren yang beragam. Permintaan dari industri hilir melemah, sementara pasokan dari tambang tetap ada dan tekanan regulasi/inspeksi tambang semakin besar.

Inventori di tambang utama juga meningkat karena sedikitnya pembelian dari pengguna hilir.

Setelah libur, pembeli (seperti baja / industri kokas) juga masih menahan pembelian dan menunggu harga stabil atau kepastian pasokan.

Aktivitas perdagangan secara keseluruhan menjadi kurang likuid, karena pembeli dan penjual bersikap hati-hati.

Di pelabuhan utara khususnya, perdagangan masih terasa lesu pada hari pertama perdagangan pasca-liburan. Ketidakpastian dari pengguna hilir (utilities / pembangkit dan industri) yang memilih strategi wait and see daripada melakukan pembelian agresif.

Setelah masa liburan, kebutuhan listrik bisa rendah sementara musim dingin belum betul-betul tiba, sehingga dorongan permintaan belum terasa.

Kabar baik datang dari Mongolia. Volume ekspor batu bara ekspor terus meningkat selama tiga bulan terakhir.

Diperkirakan pada akhir September volume ekspor akan mencapai 3,2 juta ton sehingga akan menjadi capaian bulanan tertinggi dalam 15 tahun untuk periode September.

Dari Eropa, harga batu bara diperkirakan akan pulih selama musim dingin mendatang seiring dengan adanya "penyesuaian" pada pasokan dari Kolombia. CNBC INDONESIA RESEARCH (mae/mae)

Coking coal trading activity in China has been relatively calm, with prices showing mixed trends. Downstream demand has weakened, while mine supply remains strong, and regulatory and inspection pressures are increasing.

Inventories at major mines also increased due to fewer purchases from downstream users.

After the holiday, buyers (such as the steel/coke industry) are also still holding back purchases and waiting for stable prices or certainty of supply.

Overall trading activity has become less liquid, as buyers and sellers are cautious.

In the northern ports, in particular, trading remained sluggish on the first post-holiday trading day. Uncertainty among downstream users (utilities/power plants and industrial plants) led to a wait-and-see approach rather than aggressive buying.

After the holiday season, electricity demand may be low while winter has not yet fully set in, so the demand boost is not yet felt.

Good news comes from Mongolia. Coal export volumes have continued to increase over the past three months.

It is estimated that by the end of September, export volume will reach 3.2 million tonnes, which will be the highest monthly achievement in 15 years for the September period.

From Europe, coal prices are expected to recover during the upcoming winter as supplies from Colombia adjust. CNBC INDONESIA RESEARCH (mae/mae)



MIND ID Kokohkan Fondasi ESG untuk Hilirisasi dan Masa Depan Berkelanjutan Indonesia

Yurika

HOLDING Industri Pertambangan Indonesia MIND ID konsisten dalam penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) merupakan bagian menyeluruh dari setiap proses bisnis pertambangan.

Komitmen keberlanjutan dijalankan sejak tahap pratambang—melalui program *nursery* bibit endemik dan studi baseline lingkungan—hingga tahap operasi dan pascatambang melalui reklamasi terpadu serta pemberdayaan masyarakat di wilayah operasional.

Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama, menyampaikan MIND ID sebagai *strategic Active Holding* konsisten mengintegrasikan seluruh program yang bertujuan untuk mampu memberikan manfaat berkelanjutan pembangunan masa depan.

Implementasi prinsip ESG dijalankan secara komprehensif ke dalam proses bisnis, dan diupayakan agar mampu memberi manfaat jangka panjang bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Implementasi proses bisnis yang berlandaskan keberlanjutan adalah langkah strategi jangka panjang dalam membangun peradaban. Kami akan terus memastikan kegiatan tambang memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem demi masa depan yang berkelanjutan," ujarnya.

MIND ID Strengthens ESG Foundations for Downstreaming and Indonesia's Sustainable Future

Yurika

THE **INDONESIAN** Mining Industry Holding MIND ID is consistent in implementing *Environmental, Social, and Governance* (ESG) principles as an integral part of every mining business process.

Sustainability commitments are implemented from the pre-mining stage—through endemic seed *nursery* programs and environmental baseline studies—to the operational and post-mining stages through integrated reclamation and community empowerment in operational areas.

MIND ID Corporate Secretary, Pria Utama, said that MIND ID as a *strategic Active Holding* consistently integrates all programs aimed at providing sustainable benefits for future development.

The implementation of ESG principles is carried out comprehensively into business processes, and efforts are made to provide long-term benefits for the development and welfare of society.

"Implementing business processes based on sustainability is a long-term strategic step in building civilization. We will continue to ensure that mining activities provide economic benefits while maintaining ecosystem balance for a sustainable future," he said.

Capaian nyata terlihat pada sejumlah anggota BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID. PT Freeport Indonesia, misalnya, telah menanam 164 jenis tanaman pada lahan bekas pengendapan tailing dan area percobaan reklamasi.

Sekitar 100 hektar areal tailing di MP21 dikelola menjadi lahan multi-pemanfaatan untuk perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan, sekaligus dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan lingkungan dan konservasi—sebuah bukti rehabilitasi lahan yang memberi nilai tambah ekologis dan sosial setelah dua dekade pengelolaan.

Sejak 2005, seluas 1.552 hektar lahan muara yang dialiri tailing juga telah direhabilitasi melalui penanaman mangrove, memperkuat fungsi kawasan-nya sebagai benteng alami pesisir dan daerah tangkapan karbon.

Dalam upaya transisi energi dan pengurangan emisi, PT Aneka Tambang Tbk mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di tambang emas Pongkor, yang berhasil menekan emisi CO₂ hingga puluhan ribu ton per tahun dan menjadi langkah konkret bagi transformasi energi di sektor pertambangan.

Sementara itu, PT Timah Tbk terus bergerak aktif dalam pemberdayaan sosial ekonomi lokal di Bangka Belitung melalui program pembinaan UMKM, pembekalan digitalisasi usaha, dan akses permodalan.

Program-program ini membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk masuk ke rantai pasok tambang dan mendorong peningkatan kapasitas serta pendapatan—beberapa UMKM binaan mencatat kenaikan omzet rata-rata hingga 30 persen.

Tangible achievements are evident in several members of the Indonesian Mining Industry Holding Company MIND ID. PT Freeport Indonesia, for example, has planted 164 plant species on former tailings deposition sites and reclamation trial areas.

Approximately 100 hectares of tailings area in MP21 is managed as a multi-use area for plantations, agriculture, fisheries, and livestock, while also being used as a facility for environmental education and conservation—a testament to the land rehabilitation that provides ecological and social added value after two decades of management.

Since 2005, 1,552 hectares of estuary land flowing through tailings has also been rehabilitated through mangrove planting, strengthening the area's function as a natural coastal barrier and carbon capture area.

In an effort to transition energy and reduce emissions, PT Aneka Tambang Tbk operates a Solar Power Plant (PLTS) at the Pongkor gold mine, which has successfully reduced CO₂ emissions by tens of thousands of tons per year and is a concrete step towards energy transformation in the mining sector.

Meanwhile, PT Timah Tbk continues to actively engage in local socio-economic empowerment in Bangka Belitung through MSME development programs, business digitalization training, and access to capital.

These programs open up opportunities for small businesses to enter the mining supply chain and drive increased capacity and revenue—some assisted MSMEs have recorded average turnover increases of up to 30 percent.

Pria Utama menegaskan bahwa program hilirisasi BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID dirancang untuk memberikan manfaat yang inklusif—tidak hanya diukur dari nilai ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan.

"Bagi kami, prinsip ESG bukan sekadar pemenuhan regulasi; ini adalah langkah strategis untuk memastikan setiap aktivitas operasional membawa dampak nyata: memulihkan dan menjaga keseimbangan alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar," pungkasnya. (RA)

Pria Utama emphasized that the downstreaming program of the Indonesian Mining Industry Holding BUMN MIND ID is designed to provide inclusive benefits—not only measured in economic value, but also from social and environmental aspects.

"For us, ESG principles are not just about complying with regulations; they are a strategic step to ensure that every operational activity has a real impact: restoring and maintaining the balance of nature while improving the well-being of surrounding communities," he concluded. (RA)



Copper hits \$11 000/t for first time since May 2024

ByReuters

COPPER prices hit \$11 000 per metric ton on Thursday, a level not seen in over 16 months, as widespread disruption at mines sparks fears of a shortage of supply and attracts speculative inflows.

Benchmark three-month copper on the London Metal Exchange CMCU3 rose 3.1% to hit the \$11 000 mark, within striking distance of its all-time high of \$11 104.50 set in May 2024, before pulling back to \$10 970 as of 1336 GMT.

The red metal has risen more than 21% so far in 2025, gaining momentum through strong demand, a weak dollar and falling interest rates, before a series of incidents at key copper mines, including a mudslide at Grasberg in Indonesia last month, fuelled the rally further.

The market is "seeing outside investment and doesn't have much experience of the power of it," said Alastair Munro, senior metals strategist at broker Marex. 

THE BUSINESS TIMES

Silver hits US\$50 for first time in decades

GOLD slipped back below US\$4,000 an ounce and silver retreated from its highest level since 1980 as US equities weakened and investors locked in profits.

Bullion slipped after a torrid rally this week left prices vulnerable to pullbacks on concerns that the metal is trading at overheated levels. Technical indicators show gold's been trading in overbought territory for the past month, likely leading to some profit-taking by investors following a scorching four-day run. Platinum and palladium also fell.

Gold's sell-off coincided with Thursday's (Oct 9) weakness in US equities. While gold is traditionally viewed as a hedge against riskier assets such as stocks, it often falls during broad market selloffs as investors sell their holdings to cover losses in other markets.

Meanwhile, silver retreated after touching US\$51.24 an ounce earlier Thursday, the highest in more than four decades. Silver's surge lifted prices by more than 70 per cent this year, outperforming gold's year-to-date performance.

The rally among the two key precious metals is part of a growing search for haven assets sparked by fears of fiscal risks in the US, an overheating equities market and threats to the US Federal Reserve's independence.

Silver often moves in tandem with gold, sharing its strong negative correlation with the US dollar and Fed interest rates. But the metal is also notoriously volatile, and has a cult following among retail investors who view silver prices as being suppressed by large banks and institutions.

Spot gold fell 1.6 per cent to 3,976.65 as at 4.32 pm in New York, while spot silver was 0.8 per cent higher at US\$49.29 an ounce. BLOOMBERG

THE ECONOMIC TIMES

Gold poised for eighth weekly rise on firm safe-haven demand

By Reuters

GOLD edged higher on Friday and headed for its eighth straight weekly gain, as lingering geopolitical and economic uncertainty alongside expectations for interest rate cuts from the U.S. Federal Reserve boosted demand for bullion.

Spot gold was up 0.1% to \$3,977.87 per ounce as of 0120 GMT. Bullion is up 2.3% so far this week.

U.S. gold futures for December delivery gained 0.5% to \$3,992.40.

New York Fed President John Williams signaled on Thursday he would be comfortable with cutting rates again, despite some policymakers' qualms about rising inflation that suggest such a decision won't be easily made.

Traders currently price in a 25-basis-point cut in October and another in December, with a 95% and 82% chance, respectively, according to CME FedWatch Tool.

Markets this week have grappled with political turmoil in Japan and France alongside an ongoing U.S. government shutdown, all of which have done little to stoke confidence in investors, who have sought safety in gold.

The number of Americans filing new applications for unemployment benefits increased again last week, economists estimated on Thursday, hinting at some early layoffs of contractors related to the U.S. government shutdown.

Bullion surged past \$4,000 per ounce for the first time on Wednesday, reaching a record high of \$4,059.05. The non-yielding asset, traditionally considered a hedge during geopolitical and economic uncertainty, has gained about 52% this year.

SPDR Gold Trust, the world's largest gold-backed exchange-traded fund, said its holdings fell 0.11% to 1,013.44 metric tons on Thursday from 1,014.58 tons on Wednesday.

Kotak Mahindra Asset Management Company (KMAMC) has temporarily suspended fresh lump-sum and switch-in investments into the Kotak Silver ETF Fund of Fund, effective October 10, 2025, the company said in a statement on Thursday.

Elsewhere, spot silver climbed 1.2% to \$49.70 per ounce, after hitting an all-time high of \$51.22 on Thursday. Platinum rose 0.4% to \$1,625.30 and palladium gained 1% to \$1,426.



Metso recognises 50 years of front-end comminution with Nordberg C Series jaw crusher

METSO is celebrating the 50th anniversary of its iconic Nordberg® C Series™ jaw crushers – a solution in primary crushing applications in aggregates and mining.

Introduced in 1975, the Nordberg C Series was developed by a team of engineers in Tampere, Finland, to bring a new level of performance and durability to jaw crushers. Based on advanced engineering research rather than traditional rules of thumb, the C Series quickly set a new standard in the industry with its modular design, and optimised crushing geometry that revolutionised the market, Metso says.

Since then, Metso has delivered over 13,000 Nordberg C Series jaw crushers worldwide. “Known for their reliability, safety, high performance, and long service life, the crushers have become a cornerstone of primary crushing operations in aggregates quarries, mining sites and industrial installations globally,” Metso added.

The first innovative Nordberg C Series crushers had non-welded, bolted frame construction and aggressive motion, ensuring optimal material flow. Since the original design, the C Series has evolved with a range of user-friendly features that enhance safety and simplify maintenance, reducing downtime. Significant advancements in automation and digital connectivity have further transformed the C Series, enabling more efficient crusher control and condition monitoring.

Tuomas Takalo, Global Product Manager at Metso, said: “The success of the Nordberg C Series is based on decades of listening to our customers, refining the design and staying ahead of industry demands. It’s a product that has proven itself over generations. A trusted choice worldwide, our machines continue to deliver tonnes safely and reliably, day in and

day out. We are proud of the development work we have carried out at Metso together with our customers. Just as in the original design, our product development today is guided by a deep understanding of customer needs, data-driven insights and thorough testing at Metso's research and testing facilities."

Decades of experience behind the Nordberg C Series extend well beyond the crusher itself, shaping the design of Metso's OEM wear parts to deliver maximum performance and uptime. The range of wear part profiles and alloys means that customers can find the ideal solution for their specific feed material and end-product requirements while achieving the lowest cost per tonne, the company says.

Metso concluded: "To ensure the Nordberg C Series continues to deliver value throughout its lifecycle, Metso provides comprehensive support through its global network of service experts and parts distribution centres. This ensures fast response times, expert maintenance, and ongoing operational reliability wherever our customers operate." 

KITCO

Copper output from Codelco slides 25% in August after deadly mine accident

By Reuters

COPPER production from Chilean state-run miner Codelco tumbled 25% in August, data from copper commission Cochilco showed on Thursday, after a deadly collapse stunted output from its most-profitable mine.

Codelco's El Teniente mine was forced to halt production after the July 31 accident that killed six people. The miner has estimated that the collapse dented output by around 33,000 metric tons.

For the month, the miner's total output slipped to 93,400 tons.

Meanwhile, production at BHP's Escondida mine, the world's largest copper mine, was nearly stable at 105,100 tons.

At Collahuasi, another major copper mine jointly run by Glencore and Anglo American, output fell 27% to 35,400 tons on lower-grade ore.

(By Kylie Madry and Fabian Cambero; Editing by Aida Pelaez-Fernandez)

MINING.COM

RANKED: Top 20 biggest copper mines 2025

MINING.com Editor

THE COPPER price hit a new 16 month high in London this week, while BHP is predicting global copper demand to grow by at least a million tonnes a year, rising from the current 33 million tonnes annually to 50 million tonnes by 2050. US Geological Survey data signals supply must at least double to avoid a severe crunch.

Amplifying the alarm, some of the world's biggest mines are experiencing production setbacks. The shutdown of Grasberg could swing the copper market into a deficit this year, according to analysts at Goldman Sachs. Flooding at Kamo-a-Kakula, another major producer, caused its operator Ivanhoe to revise down its guidance, while Teck Resources slashed its copper guidance over persistent setbacks at its Quebrada Blanca mine in Chile and Highland Valley Copper operation in Canada.

Tracking global production, we rank the world's top 20 copper mines for the first half of 2025, measured in kilotonnes (kt).

	Property	Owner (s)	Country	H1 Production (kt)
1.	Escondida	BHP Group, Rio Tinto, Mitsubishi, Nippon Mining	Chile	680.5
2.	Grasberg	Persero, Freeport-McMoRan	Indonesia	297.1
3.	Kamo-a-Kakula	Ivanhoe Mines, Zijin, Crystal River, DRC Government	Democratic Republic of the Congo	245.1
4.	Buenavista	Southern Copper	Mexico	207.5
5.	Cerro Verde	Freeport-McMoRan, Sumitomo, Buenaventura	Peru	193.2
6.	Collahuasi	Glencore, Anglo American, Mitsui	Chile	189.6
7.	El Teniente	Codelco	Chile	172.0
8.	Quellaveco	Anglo American, Mitsubishi	Peru	156.6
9.	Antamina	Glencore, BHP, Teck Resources, Mitsubishi	Peru	154.4
10.	Morenci	Freeport-McMoRan, Sumitomo	USA	152.5
11.	Oyu Tolgoi	Rio Tinto, Mongolian Government	Mongolia	152.0
12.	Los Pelambres	Antofagasta, JX Metals, Mitsubishi, Marubeni	Chile	143.2
13.	Spence	BHP	Chile	141.3
14.	Radomiro Tomic	Codelco	Chile	139.2
15.	Toquepala	Southern Copper	Peru	128.5
16.	Olympic Dam	BHP	Australia	117.0
17.	Chuquibambilla	Codelco	Chile	115.3
18.	Salobo	Vale	Brazil	102.8
19.	Mt Isa	Glencore	Australia	98.9
20.	Quebrada Blanca	Teck Resources, Sumitomo, Codelco	Chile	95.0

Data Source: S&P Global, Company Reports

1. Escondida

Escondida in Chile, a joint venture between BHP, Rio Tinto Mitsubishi, Nippon Mining, holds on to the top spot, producing 680,500 tonnes of copper metal in H125. While Escondida has long ranked the world's biggest copper mine, the \$53B proposed merger between Anglo American and Teck could create the world's largest copper complex, according to analysts.

2. Grasberg

Grasberg in Indonesia, held jointly between Freeport-McMoRan and Indonesian state-owned enterprise Persero and operated by Freeport, produced 297,103 tonnes in H125. Production at Grasberg mine has been under suspension since Sept. 8 after a landslide unleashed 800,000 tonnes of mud, trapping seven workers.

3. Kamoa-Kakula

Kamoa-Kakula in the Democratic Republic of Congo. Owned jointly by Ivanhoe Mines, Zijin Mining, Crystal River and the DRC government churned out 245,129 tonnes. Ivanhoe halted operations at Kamoa-Kakula for three weeks after seismic activity on May 18 severely flooded the underground mine.

4. Buenavista

Buenavista in Mexico, owned and operated by Southern Copper takes fourth place with 207,473 tonnes produced. Copper has been mined at the site, just 22 miles south of the US border, continuously as far back as 1899.

5. Cerro Verde

Cerro Verde in Peru joint venture between Freeport-McMoRan, Sumitomo and Buenaventura 193,320 tonnes H125. The Peruvian government first mined Cerro Verde's oxide ores and built one of the world's first SX/EW facilities in 1972.

6. Collahuasi

Collahuasi in Chile, co-owned by Glencore, Anglo American and Mitsui produced 189,600 tonnes. In July, Chile flagged lagging output from the mine.

7. El Teniente

Chilean state run copper miner Codelco's El Teniente, the world's largest underground copper mine, churned out 172,000 tonnes, even though a multi-day shutdown at El Teniente due to a collapse triggered by a 4.2-magnitude earthquake in late July led to a loss of 20,000 to 30,000 metric tons.

8. Quellaveco

Quellaveco in Peru, jointly owned by Anglo American and Mitsubishi churned out 156,600 tonnes of copper metal. This year, Anglo announced its is planning an almost \$26 million upgrade at Quellaveco.

9. Antamina

Antamina in Peru, co owned by BHP, Glencore, Teck and Mitsubishi produced 154,369 tonnes in H125. Antamina's operators are forecasting an almost 20% boost in copper output next year.

10. Morenci

Morenci mine in Arizona, held by Freeport-McMohRan and Sumitomo produced 152,458 tonnes. The mine has a long history: it was established as an underground mine in 1871 by the Longfellow Mining Company and was converted into an open-pit mine by the Phelps Dodge Corporation in 1937.

11. Oyu Tolgoi

Oyu Tolgoi in Mongolia owned by Rio Tinto and the Mongolian Government 152,000 tonnes. Rio in June said the ramp up of production from Oyu Tolgoi remains on track to deliver an average of around 500,000 tonnes of copper from 2028 to 2036.

12. Los Pelambres

Los Pelambres in Chile, a joint venture between Antofagasta, JX Metals Mitsubishi and Marubeni produced 143,200 tonnes. In September, the union for supervisors rejected a contract offer, paving the way for a potential strike if further negotiations fail.

13. Spence

Spence mine in Chile, sole owned by BHP, churned out 141,300 tonnes in H125. Last year, Spence became the company's first fully autonomous operation, a status reached after a two-year journey that included converting its trucks fleet and drilling rigs.

14. Radomiro Tomic

Codelco's Radomiro Tomic mine in Chile produced 139,200 in H125. Last year, it signed a new three-year collective labor contract with the union representing Radomiro Tomic workers, ending a recurring dispute.

15. Toquepala

Southern Copper's Toquepala mine in Peru produced 128,503 tonnes in H125. A decade ago, Southern Copper sunk \$1.2 billion into the mine's expansion.

16. Olympic Dam

BHP's Olympic Dam copper mine in South Australia produced 117,000 tonnes of metal in H125. Last week, the world's top miner invested more than A\$840 million (\$555 million) in the Olympic Dam copper, gold and uranium complex, advancing a series of growth projects ahead of a multibillion-dollar expansion decision expected in 2028.

17. Chuquicamata

Codelco's Chuquicamata mine churned out 115,300 tonnes. Mirroring progress at Radomiro Tomic, Codelco and Chuquicamata workers reached an early contract agreement late last year.

18. Salobo

Vale's Salobo mine in Brazil's Pará state, produced 102,800 tonnes in H125. Last year, Vale resumed operations following a one-month suspension due to fire at a processing plant.

19. Mt Isa

Mt Isa mine in Queensland, Australia, owned by Glencore, produced 98,900 tonnes of copper metal. In July, Glencore shut its final two copper mines in Mount Isa, ending more than six decades of operations.

20. Quebrada Blanca

Quebrada Blanca in Chile, owned by Teck, Sumitomo and Codelco, produced 95,000 tonnes in H125. Last month, Teck said it was deferring major expansion projects while it works to fix output problems at Quebrada Blanca. 